

## ***Financial Distress pada BUMN: Peran Mekanisme Corporate Governance dan Political Connection***

**Zulkarnain Zulkarnain, Siti Maryam**

Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Sukabumi, Indonesia  
Email: [zulkarnain@imwi.ac.id](mailto:zulkarnain@imwi.ac.id), [shima.mariam21@gmail.com](mailto:shima.mariam21@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the effect of Corporate Governance and Political Connection on Financial Distress. The Corporate Governance mechanism used in this study is the composition of Independent Commissioner, Audit Committee, and Board's Remuneration. This study uses an explanatory quantitative approach, with secondary data obtained through the company's official website. The samples in this study were 42 in the period 2018-2020 so that obtained 126 observation. Technique of data analysis using descriptive analysis, while for hypothesis testing using logistic regression analysis. The results showed that the composition of the Independent Commissioner, the Audit Committee, the Board's Remuneration, and Political Connection had no effect on Financial Distress either partially or simultaneously.*

**Keyword:** *Corporate Governance, Political Connection, Financial Distress*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* dan *Political Connection* terhadap *Financial Distress*. Mekanisme *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komposisi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Remunerasi Dewan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi perusahaan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 perusahaan pada periode 2018-2020 sehingga total data yang diperoleh adalah sebanyak 126 data observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komposisi Komisaris Independen, Komite Audit, Remunerasi Dewan, dan Hubungan Politik tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress* baik secara parsial maupun secara simultan.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Perusahaan, Hubungan Politik, dan Kesulitan Keuangan.

### **PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih populer di banyak negara meskipun dalam beberapa dekade terakhir privatisasi semakin meluas dan kepemilikan pemerintah cenderung menurun. Kebanyakan dari BUMN tersebut bergerak di sektor-sektor penting, seperti utilitas publik, transportasi, pertambangan dan minyak bumi. Selain itu, pemerintah juga mendorong BUMN untuk mengejar

berbagai tujuan ekonomi, sosial, dan politik terutama di daerah-daerah yang pembangunannya tertinggal, memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, dan membantu pemerintah dalam menangani isu-isu nasional (Ginting & Naqvi, 2020).

Di Indonesia, BUMN berperan dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Seperti diketahui infrastruktur merupakan salah satu kendala pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka dengan adanya

kehadiran BUMN sebagai penyedia infrastruktur menjadikan BUMN sebagai bagian penting pada pertumbuhan ekonomi negara (Ginting & Naqvi, 2020). Namun begitu, kontribusi BUMN terhadap PDB Indonesia relatif kecil. Untuk tahun 2020, dengan jumlah aset BUMN yang mencapai 573 miliar dolar AS, BUMN Indonesia hanya berkontribusi sebesar 16 persen terhadap PDB Negara. Nilai tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan BUMN Singapura, yang berkontribusi sebesar 21,6 persen terhadap PDB negara dengan total aset 227 miliar dolar AS. Sementara itu BUMN China mampu berkontribusi hingga 58,4 persen terhadap PDB negara dengan total asetnya yang sebesar 10.400 miliar dolar AS (Ramalan, 2020).

Terlepas dari peran penting BUMN dalam pembangunan ekonomi negara, banyak kinerja BUMN yang jauh dari memuaskan. Alih-alih berkontribusi pada negara, sejumlah BUMN justru menjadi beban negara karena pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan BUMN yang mengalami kerugian (Pryanka & Yolandha, 2020). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, 68 persen BUMN di Indonesia berpotensi mengalami kebangkrutan, sedangkan 32 persen sisanya berada dalam kondisi aman. Lebih lanjut lagi, dari delapan BUMN penerima Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) pada tahun 2020 hanya 60 persen yang menghasilkan laba, sedangkan 40 persen sisanya rugi (Sembiring, 2021).

*Financial distress* biasanya diawali dengan perusahaan mengalami masalah arus kas sehingga tidak dapat menutupi kewajiban utangnya, kondisi tersebut umumnya terjadi sebelum perusahaan dilikuidasi atau bangkrut (Platt & Platt,

2002). Ada beberapa alasan yang diduga menjadi penyebab terjadinya *financial distress* pada BUMN, diantaranya adalah karena rendahnya keterampilan, akuntabilitas, masalah pengawasan, kurangnya profesionalisme, masalah otonomi, kurangnya kejelasan visi-misi dan tujuan, campur tangan politik dan korupsi, produktivitas karyawan yang rendah, campur tangan pemerintah yang tinggi, operasional dan manajerial yang tidak efisien, juga karena manajemen keuangan dan struktur modal yang buruk (Fernando et al., 2018).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan saat terjadi krisis dikarenakan penerapan tata kelola perusahaan yang buruk (Kusuma, 2021), seperti pengambilan keputusan yang buruk dan kurangnya pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, sebagai perusahaan yang berada dibawah kendali pemerintah, BUMN lebih rentan mendapat campur tangan politik. Salah satunya adalah dengan melakukan intervensi dalam pemilihan jajaran Direksi dan Komisaris perusahaan (Sihombing, 2021). Adanya kepentingan politik dalam BUMN akan meningkatkan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Seperti dengan menggunakan biaya operasional BUMN untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya, sehingga tingkat *financial distress* pada BUMN akan lebih tinggi (Ginting & Naqvi, 2020).

Tata kelola perusahaan adalah sebuah mekanisme yang mengatur hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan (Tricker, 2019). Tata kelola perusahaan muncul sebagai akibat adanya masalah keagenan (*agency conflict*) antara

manajemen dengan pemegang saham. Teori keagenan menganggap bahwa pihak manajemen (*agent*) hanya akan melakukan kebijakan atau langkah-langkah yang menguntungkan pihaknya sendiri tanpa memperhatikan keuntungan pemilik modal (*principal*) (Jensen & Meckling, 1976). Berlandaskan hal tersebut, *corporate governance* muncul sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk menjamin bahwa perusahaan dijalankan dengan berlandaskan prinsip kewajaran, transparansi, dan tanggung jawab untuk memperoleh kepercayaan investor (OJK, 2014). Sehingga perusahaan bisa berjalan dengan lebih efisien dan akan mengurangi kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress*. Adapun mekanisme tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Remunerasi Dewan. Karena berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fathonah, 2017; Luqman et al., 2018; Mariano et al., 2021) menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dinilai mampu untuk mengurangi *financial distress*. Selain itu penelitian ini juga akan menguji pengaruh hubungan politik terhadap kondisi *financial distress* karena pengaruh politik dinilai dapat meningkatkan terjadinya *financial distress* (Nugrahanti, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fathonah (2017) menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan akan menekan potensi terjadinya *financial distress*. Komisaris Independen adalah Dewan yang tidak memiliki hubungan bisnis apa pun atau hubungan lain yang dapat mengganggu kebebasannya dalam proses pengambilan keputusan (Fernando et al., 2018). Peran Komisaris Independen sangat penting

dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan karena tujuan dibentuknya Komisaris Independen dalam satu perusahaan adalah untuk melindungi pemilik saham minoritas. Semakin besar komposisi Komisaris Independen dalam perusahaan maka akan menurunkan potensi terjadinya *financial distress*. Lebih lanjut, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Luqman et al. (2018) menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan, terutama dalam hal keuangan. Keefektifan Komite Audit dalam mengawasi pengelolaan keuangan serta proses pelaporan keuangan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas *corporate governance*. Sehingga keberadaan Komite Audit dalam perusahaan akan menurunkan potensi terjadinya *financial distress*.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Mariano et al. (2021) menunjukkan bahwa Remunerasi Dewan juga berpengaruh terhadap *financial distress*. Teori agensi percaya bahwa tingkat remunerasi akan menentukan kualitas Dewan dalam mengambil keputusan sehingga akan berpengaruh terhadap kesehatan perusahaan. Semakin tinggi remunerasi yang diterima Dewan, maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanti (2020) juga menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *financial distress*. Kepentingan politik (*political interest*) merupakan masalah yang erat kaitannya dengan BUMN. manajemen perusahaan yang terlibat dalam hubungan politik (*political connection*) cenderung

rendah dalam hal pengimplementasian tata kelola perusahaan. Koneksi politik akan digunakan oleh manajer untuk memperoleh pembiayaan dari perusahaan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sehingga adanya koneksi politik dalam perusahaan dapat meningkatkan potensi terjadinya *financial distress* (kesulitan keuangan). Namun bertentangan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Dianova & Nahumury (2019) serta penelitian Shahwan & Habib (2020) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi adalah seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di *website* Kementerian Badan Usaha Milik Negara periode 2018-2020. Sampel observasi sebanyak 42 perusahaan, dengan tahun pengamatan sebanyak tiga tahun, sehingga total data yang diperoleh untuk dilakukan penelitian adalah sebanyak 126 data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data komposisi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Remunerasi Dewan diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang didapat dari *website* resmi perusahaan. Sedangkan data mengenai hubungan politik yang dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan, kemudian dilakukan penelusuran biografi Dewan melalui situs Google, *website* lembaga legislatif ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)) atau *website* partai politik (misalnya: [www.pdiperjuangan.id](http://www.pdiperjuangan.id)).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan lima variabel yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen.

### 1. Variabel Dependent (Variabel terikat)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *financial distress* perusahaan. Dalam penelitian ini variabel *financial distress* dikelompokkan menjadi dua kategori (dikotomi), dimana perusahaan perusahaan mengalami kesulitan keuangan = 1, dan perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan atau sehat = 0. Kriteria yang digunakan untuk menentukan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan adalah berdasarkan nilai *S-score* perusahaan.

### 2. Variabel Independent (Variabel bebas)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Remunerasi Dewan, dan hubungan politik.

#### a. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan yang tidak memiliki hubungan bisnis apa pun atau hubungan lain yang dapat mengganggu kebebasannya dalam proses pengambilan keputusan (Fernando et al., 2018). Menurut peraturan OJK Komposisi Dewan Komisaris Independen perusahaan yang terdaftar di pasar modal adalah paling sedikit 30 persen dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris (OJK, 2014). Dalam penelitian ini

Komposisi Dewan Komisaris Independen diukur dengan persentase anggota Komisaris Independen dari seluruh anggota Komisaris (Fathonah, 2017; Nugrahanti, 2020).

b. Komite Audit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan publik dan emiten memiliki minimal tiga anggota Komite Audit, yang mayoritas terdiri dari Dewan independen atau setidaknya satu orang anggota memiliki pengetahuan keuangan dan akuntansi. Dalam Penelitian ini, pengukuran Komite Audit berdasarkan persentase jumlah anggota Komite Audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dari jumlah seluruh anggota Komite Audit (Fathonah, 2017).

c. Remunerasi Dewan

Praktik tata kelola perusahaan internasional membagi remunerasi direktur menjadi dua bagian: gaji pokok/tetap dan kompensasi variabel atau terkait kinerja. Gaji pokok seorang direktur biasanya didasarkan pada latar belakang pendidikan, pengalaman dan idealnya harus sebanding dengan kompensasi sesama eksekutif dari perusahaan sejenis. Dalam Penelitian ini Remunerasi Dewan diukur berdasarkan jumlah Remunerasi Dewan dalam satu tahun (Mariano et al., 2021).

d. Hubungan Politik

Sampel observasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang telah mengatur bahwa negara adalah pemilik dari perusahaan BUMN, dan pemerintah dapat menunjuk seorang Menteri untuk mewakili negara di BUMN. Hukum menjamin bahwa negara memiliki kontrol atas BUMN melalui Menteri yang ditunjuknya, meskipun tingkat kontrol yang dapat dilakukan negara akan sebanding dengan tingkat kepemilikan sahamnya. Dalam penelitian ini indikator dari hubungan politik mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanti (2020) dengan beberapa penyesuaian. Suatu perusahaan dikatakan memiliki hubungan politik jika, perusahaan memiliki setidaknya satu anggota Dewan yang merupakan: (a) Presiden/Kepala Pemerintah Daerah/Anggota Parlemen/terlibat di partai politik; atau (b) memiliki hubungan yang dekat dengan politisi (diterbitkan dalam laporan tahunan dan media nasional).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data observasi sebanyak 126 data. Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Stdev
<i>Financial Distress</i>	126	0	1	0,8016	,40040
Komposisi Komisaris	126	0,00	1,00	0,3760	,12610

Independen					
Komite Audit	126	0,25	1,00	0,5930	,20923
Remunerasi	126	9,59	11,72	10,5083	,39551
Hubungan Politik	126	0	1	0,5159	,50174

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Variabel *Financial Distress* dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu mengalami *financial distress* = 1 dan kategori sehat = 0, yang berarti nilai minimum dari variabel *financial distress* dalam penelitian ini adalah 0, dan nilai maksimumnya 1. Variabel *financial distress* memiliki nilai rata-rata (*mean*) 0,8016 yang berarti 80% dari data yang diobservasi dalam penelitian ini mengalami kondisi *financial distress*. Jika dibandingkan dengan nilai standar deviasinya yang sebesar 0,40040 maka mengindikasikan bahwa data bersifat homogen, karena memiliki nilai standar deviasi lebih rendah dibanding nilai *mean* yang berarti bahwa data menyebar dekat dengan nilai rata-ratanya.

Variabel Komisaris independen memiliki nilai minimum 0,00 (0%) yang menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang tidak memiliki Komisaris Independen dalam struktur organisasinya. Nilai maksimum dari variabel komposisi Komisaris Independen adalah 1,00 (100%) yang menunjukkan bahwa seluruh anggota Komisaris merupakan Komisaris Independen, hal ini biasanya terjadi jika jumlah Komisaris dalam perusahaan hanya terdiri dari satu orang, karena peraturan perundangan mewajibkan jika Komisaris hanya terdiri dari satu orang maka Komisaris tersebut harus independen. Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel komposisi Komisaris Independen adalah sebesar 0,3760 yang menunjukkan bahwa rata-rata komposisi Komisaris Independen dalam perusahaan adalah sebesar 37%, hal

tersebut sudah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di mana komposisi Dewan Komisaris independen dalam suatu perusahaan minimal sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Nilai standar deviasi variabel komposisi Komisaris Independen adalah 0,12610 yang berarti lebih kecil dari nilai *mean*, sehingga mengindikasikan bahwa data menyebar di sekitar rata-ratanya atau data bersifat homogen.

Nilai minimum variabel Komite Audit adalah sebesar 0,25 (25%) yang berarti seperempat anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Sedangkan untuk nilai maksimum variabel Komite Audit yaitu sebesar 1,00 (100%) yang berarti bahwa seluruh anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Nilai rata-ratanya 0,5930 yang mengindikasikan bahwa 59% anggota Komite Audit memiliki keahlian bidang akuntansi atau keuangan. Jika dilihat dari nilai standar deviasinya maka kita dapat mengetahui bahwa data bersifat homogen yang berarti bahwa data menyebar di sekitar rata-ratanya, karena memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,20923 atau lebih rendah dari nilai rata-ratanya.

BUMN dengan jumlah remunerasi terendah adalah PT Jakarta Industrial Estate Pulagadung (Persero) dengan jumlah remunerasi per tahun sebesar 9,59 atau Rp3.897.720.000, sedangkan BUMN dengan jumlah remunerasi tertinggi adalah PT Telkom Indonesia Tbk dengan jumlah remunerasi per tahun sebesar 11,72 atau



Rp526.000.000.000. Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel remunerasi adalah 10,5083 atau Rp32.232.945.955, sedangkan nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,39551 yang menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar rata-ratanya atau homogen karena nilai standar deviasinya lebih rendah dari nilai rata-ratanya.

Selama proses penelitian ini penulis menemukan bahwa masih terdapat anggota partai politik, calon legislatif, calon kepala daerah, dan relawan partai politik yang menduduki jabatan Dewan Komisaris ataupun Dewan Direksi BUMN. Variabel hubungan politik dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu memiliki hubungan politik = 1 dan tidak memiliki hubungan politik = 0, maka nilai minimum untuk variabel hubungan politik adalah 0, sedangkan nilai maksimumnya adalah 1. Nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 0,5159 yang berarti 51% dari data yang diobservasi dalam penelitian ini anggota Dewan Komisaris atau Direksinya terlibat dalam hubungan politik. Jika dilihat dari nilai standar deviasinya yang sebesar 0,50174 maka menunjukkan bahwa data bersifat homogen atau data menyebar di sekitar rata-ratanya.

#### **Analisis Regresi Logistik (Logistic Regression)**

Variabel dependen dalam penelitian ini berbentuk kategori, sehingga analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi logistik. Dalam penelitian ini variabel *financial distress* dikategorikan menjadi dua kategori yaitu mengalami *financial distress* = 1, dan tidak mengalami *financial distress* = 0. Berikut merupakan hasil pengujian regresi logistik variabel independen terhadap variabel dependen:

#### **a. Menilai Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test)**

Uji kelayakan model regresi dilakukan untuk melihat kelayakan model yang dibentuk dengan melihat nilai dari hasil uji *Hosmer and Lemeshow's* test. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data dengan model. Hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow's goodness of fit test* ditunjukkan dalam tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2 Hasil Pengujian Hosmer & Lemeshow's Test**

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	5,187	8	,737

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji *Hosmer and Lemeshow test* memiliki nilai *chi square* sebesar 5,187 dengan signifikansi 0,737. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data observasi dengan data estimasi model regresi logistik. Hal tersebut berarti model yang digunakan sudah tepat atau layak, sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya.

#### **b. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)**

Pengujian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai  $-2\log$  likelihood sebelum variabel independen masuk (block 0) dengan nilai  $-2\log$  likelihood setelah variabel independen masuk (block 1). Jika terdapat selisih antara nilai  $-2\log$ likelihood pertama dengan kedua, hal tersebut menunjukkan bahwa model

regresi tersebut baik. Hasil pengujian keseluruhan model dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3 Hasil Pengujian -2 Log Likelihood (block number 0 dan 1)**

Iteration		-2 Log likelihood	Iteration		-2 Log likelihood
Step 0	1	126,295	Step 1	1	124,745
	2	125,547		2	123,721
	3	125,545		3	123,715
	4	125,545		4	123,715
				5	123,715

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Tabel 3 menunjukkan nilai -2 Log likelihood sebelum variabel independen masuk (block 0) adalah sebesar 125,545, sedangkan nilai -2 Log likelihood setelah variabel independen masuk (block 1) adalah sebesar 123,715. Hal tersebut menunjukkan selisih antara nilai -2 Log likelihood sebelum dan sesudah variabel independen masuk yaitu sebesar  $125,545 - 123,715 = 1,830$ . Penurunan ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut adalah baik, atau model dikatakan *fit* dengan data.

**c. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)**

Nilai Nagelkerke R square dalam regresi logistik dapat diinterpretasikan dengan nilai  $R^2$  dalam regresi berganda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai Nagelkerke R Square dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4 Hasil Pengujian Nagelkerke R Square**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	123,715 <sup>a</sup>	,014	,023

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Nilai Nagelkerke R Square pada penelitian ini adalah sebesar 0,023 yang berarti bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 2,3%, sedangkan 97,7% sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**d. Tabel Klasifikasi**

Tabel klasifikasi digunakan untuk melihat akurasi prediksi dari model regresi logistik. Suatu model dikatakan bernilai baik jika nilai hasil prediksi modelnya lebih dari 50%. Tabel klasifikasi dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 5 Tabel Klasifikasi**

	<i>Observed</i>	<i>Predicted</i>		
		<i>Financial Distress</i>		<i>Percentage Correct</i>
		,00	1,00	
<i>Step 1</i>	<i>Financial Distress</i>	,00	0	,0
		1,00	0	100,0
	<i>Overall Percentage</i>			80,2

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Berdasarkan tabel klasifikasi di atas, jumlah sampel yang yang tidak mengalami *financial distress* (sehat) adalah sebanyak  $0+25 = 25$  sampel. Yang benar-benar tidak mengalami *financial distress* adalah sebanyak 0 sampel, dan yang seharusnya mengalami *financial distress* namun tidak mengalami *financial distress* adalah sebanyak 25 sampel. Jumlah sampel yang mengalami *financial distress* adalah sebanyak  $0+101 = 101$  sampel.

Yang benar-benar mengalami *financial distress* adalah sebanyak 101 sampel, dan yang seharusnya tidak mengalami *financial distress* namun mengalami *financial distress* adalah 0 sampel. Secara keseluruhan persentase kebenaran adalah sebesar 80,2%, di mana nilainya lebih dari 50% yang artinya prediksi model ini mempunyai kemampuan prediksi yang baik.

**Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis**

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	X1	-2,140	1,738	1,516	1	,218	,118
	X2	,189	1,095	,030	1	,863	1,208
	X3	-,116	,567	,042	1	,838	,890
	X4	-,163	,457	,127	1	,722	,850
	Constant	3,417	6,182	,305	1	,580	30,468

Sumber: Hasil olah data SPSS (2022)

**a. Uji t (Uji Parsial)**

Uji Wald digunakan untuk menguji hipotesis variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak, yang artinya terdapat pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar

dari 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Penjelasan hasil uji wald masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel komposisi Komisaris independen (X1) terhadap variabel *financial distress* (Y)

Variabel komposisi Komisaris Independen diperoleh nilai koefisien -2,140, yang artinya setiap kenaikan komposisi Komisaris Independen akan menurunkan potensi terjadinya *financial distress* perusahaan sebesar 2,140 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Namun jika dilihat dari nilai signifikansinya, variabel komposisi komisaris independen memiliki nilai signifikansi 0,218. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel komposisi Komisaris Independen terhadap *financial distress*, sehingga **H1 ditolak**.

- 2) Variabel Komite Audit (X2) terhadap variabel *financial distress* (Y)

Variabel Komite Audit memiliki nilai koefisien sebesar 0,189, yang artinya setiap kenaikan anggota Komite Audit yang berlatar belakang pendidikan atau pengalaman dibidang akuntansi dan keuangan akan menaikkan potensi terjadinya *financial distress* pada perusahaan sebesar 0,189 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Begitu juga jika dilihat dari nilai signifikansinya yang sebesar 0,863 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Komite Audit terhadap *financial distress*, sehingga **H2 ditolak**.

- 3) Variabel Remunerasi Dewan (X3) terhadap *financial distress* (Y)

Variabel Remunerasi Dewan memiliki nilai koefisien sebesar -0,116, yang berarti setiap kenaikan

Remunerasi Dewan akan menurunkan potensi terjadinya *financial distress* sebesar 0,116, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Namun jika dilihat dari nilai signifikansinya yang sebesar 0,838 menunjukkan jika variabel Remunerasi Dewan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *financial distress*, sehingga **H3 ditolak**.

- 4) Variabel hubungan politik (X4) terhadap *financial distress* (Y)

Variabel hubungan politik memiliki nilai koefisien sebesar -0,163, yang berarti setiap kenaikan unit hubungan politik akan menurunkan potensi terjadinya *financial distress* perusahaan sebesar 0,163 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai signifikansi dari variabel hubungan politik adalah sebesar 0,722, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel hubungan politik terhadap *financial distress*, sehingga **H4 ditolak**.

#### b. Uji G (Uji Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Namun jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hasil uji G ditampilkan dalam tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7 Hasil Pengujian Omnibus  
 Test of Model Coefficient**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	1,830	4	,767
	Block	1,830	4	,767
	Model	1,830	4	,767

Sumber: Hasil olah data SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat jika nilai signifikansi uji G adalah sebesar 0,767, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel *corporate governance* dan hubungan politik secara simultan terhadap variabel *financial distress*, sehingga **H5 ditolak**.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Komposisi Komisaris Independen Terhadap *Financial Distress*

Hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel Komposisi Komisaris Independen terhadap *Financial Distress* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,218. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel komposisi Komisaris Independen terhadap *financial distress*, sehingga dapat menunjukkan bahwa berapapun jumlah komposisi Komisaris Independen dalam suatu perusahaan, kemungkinan perusahaan mengalami kondisi *financial distress* adalah sama.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widhiastuti et al. (2019) dan Nugrahanti (2020) yang menunjukkan bahwa komposisi Komisaris Independen dalam suatu perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi terjadinya *financial distress*. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris Independen dalam suatu

perusahaan tidak cukup efektif untuk mengurangi terjadinya *financial distress*. Menurut Widhiastuti et al. (2019) dan Nugrahanti (2020) hal tersebut disebabkan karena keberadaan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan hanyalah sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan regulasi saja, sehingga keberadaannya tidak berpengaruh terhadap potensi terjadinya *financial distress*.

Begitupun dalam penelitian ini, dari tabel hasil analisis deskriptif, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari variabel komposisi Komisaris Independen adalah sebesar 0,3760, atau dengan kata lain perusahaan dalam sampel penelitian ini memiliki komposisi Komisaris Independen rata-rata sebanyak 37,6%. Nilai tersebut sudah memenuhi peraturan yang ditentukan, yaitu perusahaan wajib memiliki komposisi Komisaris Independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota Komisaris. Namun belum signifikan untuk dapat mempengaruhi kondisi kesulitan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathonah (2017) dan Mariano et al. (2021) yang menyatakan bahwa komposisi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, yang berarti bahwa semakin besar komposisi Komisaris Independen dalam suatu perusahaan, maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin kecil.

### Pengaruh Komite Audit Terhadap *Financial Distress*

Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata dari variabel Komite Audit adalah sebesar 0,5930, yang berarti bahwa rata-rata lebih dari setengah anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang

mewajibkan perusahaan memiliki Komite Audit dengan minimal satu anggota dengan latar belakang akuntansi atau keuangan. Namun hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel Komite Audit terhadap *Financial Distress* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,863, nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress*, sehingga mengindikasikan bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota Komite Audit dalam bidang akuntansi atau keuangan tidak membuat perusahaan terhindar dari kondisi *financial distress*.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fathonah (2017) dan Masak & Noviyanti (2019) yang menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *financial distress*. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anggota Komite Audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan tidak mampu untuk melakukan proses pengawasan keuangan dengan efektif, sehingga keberadaannya tidak berpengaruh terhadap kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Menurut Fathonah (2017) hal tersebut dikarenakan Komite Audit dalam suatu perusahaan hanyalah formalitas untuk memenuhi syarat dari regulator saja, tanpa ditunjang dengan kinerja yang baik. Lebih jauh lagi, tidak adanya pengaruh Komite Audit terhadap *financial distress* dalam penelitian ini dapat disebabkan karena pengangkatan anggota Komite Audit hanya berdasarkan pada kedekatannya dengan anggota Dewan Komisaris, bukan berdasarkan kompetensi atau kapabilitas yang sesuai.

Hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Luqman et al. (2018)

yang menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, yang berarti Komite Audit akan menurunkan potensi terjadinya *financial distress* pada suatu perusahaan.

### **Pengaruh Remunerasi Dewan Terhadap *Financial Distress***

Nilai koefisien untuk variabel Remunerasi Dewan dalam penelitian ini adalah sebesar -0,116, yang berarti jika jumlah Remunerasi Dewan semakin besar, maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin kecil. Namun, Hasil pengujian hipotesis pengaruh variabel Remunerasi Dewan terhadap *Financial Distress* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,838. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya Remunerasi Dewan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berapapun jumlah Remunerasi Dewan suatu perusahaan, kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan adalah sama.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al. (2020) menurutnya tingkat Remunerasi Dewan di Indonesia itu dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas perusahaan. Sehingga jika profitabilitas perusahaan naik, maka Remunerasi Dewan juga naik, begitu juga sebaliknya. Sehingga tingkat Remunerasi Dewan tidak akan berpengaruh terhadap potensi terjadinya kesulitan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mariano et al. (2021) yang menyatakan bahwa semakin besar remunerasi yang diterima oleh Dewan, maka potensi perusahaan mengalami *financial distress* akan semakin kecil. Menurutnya remunerasi yang tinggi akan meningkatkan

motivasi Dewan dan kinerja perusahaan, sehingga akan menurunkan potensi terjadinya *financial distress*.

### **Pengaruh Hubungan Politik Terhadap *Financial Distress***

Nilai hasil regresi logistik untuk variabel hubungan politik memiliki nilai koefisien sebesar -0,163, yang berarti semakin banyak anggota Dewan yang memiliki hubungan politik, maka akan menurunkan potensi terjadinya *financial distress*. Namun, pengujian hipotesis pengaruh variabel Hubungan Politik terhadap *Financial Distress* memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,722, sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel hubungan politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *financial distress*.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh He et al. (2019) yang menunjukkan bahwa variabel hubungan politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, namun adanya koneksi politik dapat memudahkan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan di saat terjadi pemulihan *distress*, sehingga pemulihan akan berlangsung lebih cepat dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik. Hal tersebut menunjukkan jika hubungan politik yang ada tidak berdampak terhadap kebijakan yang diambil oleh anggota Dewan, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan.

Penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanti (2020) yang menunjukkan jika hubungan politik memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*. Menurutnya anggota Dewan akan memanfaatkan hubungan politik yang mereka miliki untuk memperoleh

keuntungan pribadi melalui pembiayaan perusahaan. Yang artinya, adanya hubungan politik dalam perusahaan, akan meningkatkan potensi terjadinya *financial distress*.

### **Pengaruh *Corporate Governance* dan Hubungan Politik terhadap *Financial Distress***

Nilai signifikansi dari pengujian secara simultan variabel *corporate governance* dan hubungan politik terhadap *financial distress* adalah sebesar 0,767. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *corporate governance* dan hubungan politik secara simultan terhadap *financial distress*, yang menunjukkan bahwa kejadian *financial distress* dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel *corporate governance* dan hubungan politik.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Remunerasi Dewan, dan Hubungan Politik terhadap variabel *Financial Distress*. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris Independen dalam suatu perusahaan tidak cukup efektif untuk mengurangi terjadinya *financial distress*.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota Komite Audit dalam bidang akuntansi atau keuangan juga tidak membuat perusahaan terhindar dari kondisi *financial distress*. Begitu pun Remunerasi Dewan tidak cukup untuk memotivasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga tidak dapat menghindarkan perusahaan dari kondisi kesulitan keuangan.

Hubungan politik yang ada juga tidak berdampak terhadap kebijakan yang diambil oleh anggota Dewan, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan. Hal ini berarti kondisi *financial distress* yang dialami perusahaan disebabkan oleh faktor lain di luar mekanisme *corporate governance* dan hubungan politik.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain diluar variabel Komposisi Komisaris Independen, Komite Audit, Remunerasi Dewan dan Hubungan Politik untuk memprediksi kemungkinan terjadinya *financial distress*. Penelitian ini menggunakan model Springate S-score untuk menilai kondisi *financial distress* perusahaan. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menggunakan pengukuran lain, seperti model Z-score.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dianova, A., & Nahumury, J. (2019). Investigating the Effect of Liquidity, Leverage, Sales Growth and Good Corporate Governance on Financial Distress. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(2), 143–156. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i2.49>
- Fathonah, A. N. (2017). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 1(2).
- Fernando, A. C., Satheesh, E. K., & Muraleedharan, K. P. (2018). *Corporate Governance: Principles, Policies and Practices, Third Edition*. Pearson India.
- Ginting, E., & Naqvi, K. (2020). *Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises*. Asian Development Bank.
- Gunawan, A., Assagaf, A., Sayidah, N., & Mulyaningtyas, A. (2020). Pengaruh Kompensasi Manajerial, Working Capital, Pertumbuhan Investasi, Leverage, dan Cash Flow Operation Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan BUMN. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3, 226. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4135>
- He, Y., Xu, L., & McIver, R. P. (2019). How does political connection affect firm financial distress and resolution in China? *Applied Economics*, 51(26), 2770–2792. <https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1558358>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Finance Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kusuma, H. (2021). *Sri Mulyani Beberkan Penyebab Banyak Perusahaan Bangkrut saat Krisis*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4337447/sri-mulyani-beberkan-penyebab-banyak-perusahaan-bangkrut-saat-krisis>
- Luqman, R., Ul Hassan, M., Tabasum, S., Khakwani, M. S., & Irshad, S. (2018). Probability of financial distress and proposed adoption of corporate governance structures: Evidence from Pakistan. *Cogent Business & Management*, 5(1), 1492869.
- Mariano, S. S. G., Izadi, J., & Pratt, M. (2021). Can we predict the likelihood of financial distress in companies from their corporate governance and borrowing? *International Journal of Accounting & Information Management*.
- Masak, F., & Noviyanti, S. (2019). Pengaruh karakteristik komite audit terhadap financial distress. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 237–247.



- Nugrahanti, Y. W. (2020). Do firm characteristics, political connection and corporate governance mechanism affect financial distress? (Evidence from Indonesia). *International Journal of Trade and Global Markets*, 13(2), 220–250.  
<https://doi.org/10.1504/IJTGM.2020.106753>
- OJK. (2014). *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Platt, H. D., & Platt, M. B. (2002). Predicting corporate financial distress: Reflections on choice-based sample bias. *Journal of Economics and Finance*, 26(2), 184–199.
- Pryanka, A., & Yolanda, F. (2020). *Ekonom: PMN Berpotensi Jadi Risiko Fiskal Tahun Depan*. Republika.  
<https://www.republika.co.id/berita/qgg yg9370/ekonom-pmn-berpotensi-jadi-risiko-fiskal-tahun-depan>
- Ramalan, S. (2020). *Kontribusi BUMN di Indonesia Lebih Kecil Dibanding Negara Lain, Ini Langkah Erick Thohir*. INews.Id.  
<https://www.inews.id/finance/makro/kontribusi-bumn-di-indonesia-lebih-kecil-dibanding-negara-lain-ini-langkah-erick-thohir>
- Sembiring, L. J. (2021). *Sri Mulyani: 68% BUMN Bisa Bangkrut*. CNBC Indonesia.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211216083707-4-299671/sri-mulyani-68-bumn-bisa-bangkrut>
- Shahwan, T. M., & Habib, A. M. (2020). Does the efficiency of corporate governance and intellectual capital affect a firm's financial distress? Evidence from Egypt. *Journal of Intellectual Capital*, 21(3), 403–430.  
<https://doi.org/10.1108/JIC-06-2019-0143>
- Sihombing, U. P. (2021). *Tanri Abeng Minta Tak Ada Intervensi Politik di Direksi BUMN*. CNN Indonesia.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210623204503-92-658533/tanri-abeng-minta-tak-ada-intervensi-politik-di-direksi-bumn>
- Tricker, R. I. (2019). *Corporate governance: Principles, policies, and practices*. Oxford University Press, USA.
- Widhiastuti, R., Nurkhin, A., & Susilowati, N. (2019). The Role of Financial Performance in Mediating The Effect of Good Corporate Governance on Financial Distress. *Jurnal Economia*, 15(1), 34–47.  
<https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.22927>